



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1252 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Kabupaten Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 20' 52.41050''$  LS dan  $106^{\circ} 25' 36.12294''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Durian sampai pada PABU 001 dengan koordinat  $06^{\circ} 20' 50.37796''$  LS dan  $106^{\circ} 25' 28.12473''$  BT yang terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Utara Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Durian sampai pada PABU 002 dengan koordinat 06<sup>0</sup> 20' 47.42366" LS dan 106<sup>0</sup> 24' 50.94269" BT yang terletak di Desa Sangiang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang; dan
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Durian sampai pada PABU 003 dengan koordinat 06<sup>0</sup> 20' 17.41511" LS dan 106<sup>0</sup> 24' 13.05759" BT yang terletak di Desa Sangiang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Durian sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang Provinsi Banten yang ditandai oleh TK.02 dengan koordinat 06<sup>0</sup> 19' 49.08668" LS dan 106<sup>0</sup> 24' 03.39358" BT.

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2015.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 744.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.